

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BIRO ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KALBAR

—
T.A. 2020



KATA PENGANTAR

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR (BIRO ORGANISASI) adalah salah satu entitas akuntansi dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR (BIRO ORGANISASI) disajikan sesuai dengan peraturan pemerintah yang mengatur tentang Standar Akuntansi Pemerintah sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/ pertanggungjawaban dan transparansi, kami akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR (BIRO ORGANISASI) yang tepat waktu dan akurat sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Pontianak, 31 Desember 2020

Kepala Biro Organisasi Setda Prov.KALBAR



RITA HASTARTITA, S.Sos, M.Si

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

Pernyataan Tanggung Jawab

Ringkasan Laporan Keuangan

I Laporan Realisasi Anggaran

II Laporan Operasional

III Neraca

IV Laporan Perubahan Ekuitas

V Catatan atas Laporan Keuangan

Bab I Pendahuluan

1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan

1.2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan

1.3. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan

Bab II Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan

2.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan

2.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Bab III Penjelasan pos-pos laporan keuangan

3.1. Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos laporan keuangan.

3.1.1. Laporan Realisasi Anggaran

3.1.2. Laporan Operasional

3.1.3. Neraca

3.1.4. Laporan Perubahan Ekuitas

Bab IV Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan.

Bab V Penutup.

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR (BIRO ORGANISASI) Provinsi Kalimantan Barat yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Laporan Operasional, (c) Neraca, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan dan Catatan atas Laporan Keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pontianak, 31 Desember 2020

Kepala Biro Organisasi Setda Prov.KALBAR



RITA HASTARITA, S.Sos, M.Si

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR (BIRO ORGANISASI) Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2020 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan di lingkungan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat. :

Laporan Keuangan ini meliputi:

I. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020.

Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020 ditargetkan sebesar Rp. 0,00 terealisasi sebesar Rp. 0,00 atau mencapai 0,00% dan Realisasi Belanja Daerah pada Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp. 2.202.436.000,00 atau mencapai 95,91% dari alokasi anggaran sebesar Rp. 2.296.416.539,00

II. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Laporan Operasional untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 terdiri dari Pendapatan-LO sebesar 0,00, beban sebesar 2.315.443.915,00 sehingga terdapat Surplus/Defisit Kegiatan Operasional sebesar -2.315.443.915,00.

III. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2020

Nilai Aset per 31 Desember 2020 dicatat dan disajikan sebesar Rp. 537.458.432,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp. 0,00 Aset Tetap sebesar Rp. 523.693.476,00 Aset Lainnya sebesar Rp. 13.764.956,00.

Nilai Kewajiban sebesar Rp. 0,00 dan Nilai Ekuitas sebesar Rp. 537.458.432,00, sehingga jumlah kewajiban dan ekuitas adalah sebesar Rp. 537.458.432,00

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Ekuitas per 1 Januari 2020 adalah sebesar Rp. -16.116.076.817,00 ditambah Defisit-LO sebesar Rp. -2.315.443.915,00 kemudian ditambah/dikurangi dengan Lain-lain sebesar Rp. 207.782.164,00 sehingga Ekuitas Akhir entitas SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR (BIRO ORGANISASI) Provinsi Kalimantan Barat per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp. -18.223.738.568,00.

V. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2020 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR (BIRO ORGANISASI)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(dalam rupiah)

URAIAN	ANGGARAN 2020	REALISASI 2020	%	REALISASI 2019
PENDAPATAN				
PENDAPATAN ASLI DAERAH				
Pendapatan Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain PAD yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH				
Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN	0,00	0,00	0,00	0,00
BELANJA				
BELANJA OPERASI				
Belanja Pegawai	1.252.930.000,00	1.228.870.000,00	98,08	1.273.580.000,00
Belanja Barang dan Jasa	1.035.986.539,00	966.066.000,00	93,25	1.548.854.850,00
Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
BELANJA MODAL				
Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Peralatan dan Mesin	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00	0,00
Belanja Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BELANJA	2.296.416.539,00	2.202.436.000,00	95,91	2.822.434.850,00
SURPLUS/DEFISIT	(2.296.416.539,00)	(2.202.436.000,00)	95,91	(2.822.434.850,00)

Pontianak, 31 Desember 2020

Kepala Biro Organisasi Setda Prov.KALBAR



RITA HASTARITA, S.Sos, M.Si
NIP.19791208 200003 2 002

II. LAPORAN OPERASIONAL (LO)

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR (BIRO ORGANISASI)

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(dalam rupiah)

URAIAN	31 DESEMBER 2020	31 DESEMBER 2019	Kenaikan(Penurunan)	%
KEGIATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN				
PENDAPATAN ASLI DAERAH				
Pendapatan Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain PAD yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
PENDAPATAN TRANSFER				
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
Dana Bagi Hasil Pajak	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Alokasi Umum	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Alokasi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA				
Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Penyesuaian	0,00	0,00	0,00	0,00
Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pendapatan Transfer	0,00	0,00	0,00	0,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan Yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN	0,00	0,00	0,00	0,00
BEBAN				
BEBAN OPERASI				

URAIAN	31 DESEMBER 2020	31 DESEMBER 2019	Kenaikan(Penurunan)	%
Beban Pegawai	1.228.870.000,00	1.273.580.000,00	(44.710.000,00)	96,49
Beban Barang dan Jasa	966.066.000,00	1.548.029.850,00	(581.963.850,00)	62,41
Beban Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan	120.507.915,00	87.836.053,14	32.671.861,86	137,20
Beban Penyisihan Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Lain-lain	0,00	7.676.597,86	(7.676.597,86)	0,00
Jumlah Beban Operasi	2.315.443.915,00	2.917.122.501,00	(601.678.586,00)	79,37
BEBAN TRANSFER				
Beban Transfer Bagi Hasil Pajak	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Transfer Keuangan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Beban Transfer	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BEBAN	2.315.443.915,00	2.917.122.501,00	(601.678.586,00)	79,37
JUMLAH SURPLUS/ DEFISIT DARI OPERASI				
SURPLUS/ DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
SURPLUS NON OPERASIONAL				
Surplus Penjualan Aset Non Lancar				
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang				
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya				
Jumlah Surplus Non Operasional				
DEFISIT NON OPERASIONAL				
Defisit Penjualan Aset Non Lancar				
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang				
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya				
Jumlah Defisit Non Operasional				
JUMLAH SURPLUS/ DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				

URAIAN	31 DESEMBER 2020	31 DESEMBER 2019	Kenaikan(Penurunan)	%
SURPLUS/ DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA				
POS LUAR BIASA				
PENDAPATAN LUAR BIASA				
Pendapatan Luar Biasa				
Jumlah Pendapatan Luar Biasa				
BEBAN LUAR BIASA				
Beban Luar Biasa				
Jumlah Beban Luar Biasa				
POS LUAR BIASA				
SURPLUS/ DEFISIT - LO	(2.315.443.915,00)	(2.917.122.501,00)	601.678.586,00	79,37

Pontianak, 31 Desember 2020

Kepala Biro Organisasi Setda Prov.KALBAR



RIITA HASTARITA, S.Sos, M.Si

NIP: 19791208 200003 2 002

III. NERACA

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR (BIRO ORGANISASI)

NERACA

PER 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2020	31 DESEMBER 2019
1	ASET	537.458.432,00	442.684.183,00
2	ASET LANCAR	0,00	0,00
3	Kas dan Setara Kas	0,00	0,00
4	Kas di Kas Daerah	0,00	0,00
5	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
6	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
7	Kas di BLUD	0,00	0,00
8	Kas Lainnya	0,00	0,00
9	Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
10	Piutang Pendapatan	0,00	0,00
11	Piutang Pajak Daerah	0,00	0,00
12	Piutang Retribusi Daerah	0,00	0,00
13	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
14	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	0,00	0,00
15	Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	0,00	0,00
16	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
17	Piutang Lainnya	0,00	0,00
18	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	0,00	0,00
19	Penyisihan Piutang	0,00	0,00
20	Penyisihan Piutang Pendapatan	0,00	0,00
21	Beban Dibayar Dimuka	0,00	0,00
22	Beban Jasa Dibayar Dimuka	0,00	0,00
23	Persediaan	0,00	0,00
24	Persediaan Bahan Pakai Habis	0,00	0,00
25	Persediaan Bahan/Material	0,00	0,00
26	Persediaan Barang Lainnya	0,00	0,00
27	INVESTASI JANGKA PANJANG	0,00	0,00
28	Investasi Jangka Panjang Permanen	0,00	0,00

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2020	31 DESEMBER 2019
29	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00
30	ASET TETAP	523.693.476,00	428.919.227,00
31	Tanah	0,00	0,00
32	Peralatan dan Mesin	2.081.251.937,00	1.859.553.278,00
33	Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
34	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00
35	Aset Tetap Lainnya	279.037.515,00	279.037.515,00
36	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00
37	Akumulasi Penyusutan	(1.836.595.976,00)	(1.709.671.566,00)
38	Mesin Akumulasi Penyusutan Peralatan dan	(1.836.595.976,00)	(1.709.671.566,00)
39	Bangunan Akumulasi Penyusutan Gedung dan	0,00	0,00
40	jaringan Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan	0,00	0,00
41	ASET LAINNYA	13.764.956,00	13.764.956,00
42	Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00
43	Tagihan Penjualan Angsuran	0,00	0,00
43	Tagihan Penjualan Angsuran	0,00	0,00
44	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0,00	0,00
45	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
46	Sewa	0,00	0,00
47	Bangun Guna Serah	0,00	0,00
48	Bangun Serah Guna	0,00	0,00
49	Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00
50	Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00
51	Berwujud Akumulasi Amortisasi Aset Tidak	0,00	0,00
52	Aset Lain-lain	13.764.956,00	13.764.956,00
53			
54	KEWAJIBAN DAN EKUITAS	537.458.432,00	442.684.183,00
55	KEWAJIBAN	537.458.432,00	442.684.183,00
56	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	0,00	0,00
57	Utang Perhitungan Pihak Ketiga	0,00	0,00
58	Utang PPh Pusat	0,00	0,00
59	Utang PPN Pusat	0,00	0,00
60	Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya	0,00	0,00
61	Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00
62	Pendapatan Diterima Dimuka Lainnya	0,00	0,00
63	Utang Belanja	0,00	0,00

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2020	31 DESEMBER 2019
64	Utang Belanja Pegawai	0,00	0,00
65	Utang Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00
66	Utang Belanja Modal	0,00	0,00
67	Utang Transfer Pemerintah Daerah	0,00	0,00
	Lainnya		
68	Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
69	Utang Kelebihan Pembayaran Transfer	0,00	0,00
70	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00
71	Utang Dalam Negeri	0,00	0,00
72	Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00	0,00
73	EKUITAS	537.458.432,00	442.684.183,00

Pontianak, 30 Desember 2020

Kepala Biro Organisasi Setda Prov.KALBAR



RIITA HASTARITA, S.Sos, M.Si

NIP.19791208 200003 2 002

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR (BIRO ORGANISASI)

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(dalam rupiah)

URAIAN	KODE	31 DESEMBER 2020	31 DESEMBER 2019
PENDAPATAN			
EKUITAS AWAL		(16.116.076.817,00)	(13.306.606.148,00)
SURPLUS/DEFISIT-LO		(2.315.443.915,00)	(2.917.122.501,00)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR :			
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN		0,00	0,00
SELISIH REVALUASI ASET TETAP		0,00	0,00
LAIN-LAIN		207.782.164,00	107.651.832,00
EKUITAS AKHIR		(18.223.738.568,00)	(16.116.076.817,00)

Pontianak, 31 Desember 2020

Kepala Biro Organisasi Setda Prov.KALBAR



RITA HASTARITA, S.Sos, M.Si

NIP: 19791208 200003 2 002

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR (BIRO ORGANISASI) Provinsi Kalimantan Barat disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintah mencakup komponen-komponen pokok yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan laporan keuangan pada intinya bertujuan untuk menyajikan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selama periode tertentu. Laporan Keuangan SKPD terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi, membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan dan bermanfaat bagi para pengguna anggaran dalam membuat dan mengevaluasi kebijakan mengenai alokasi sumber daya dan keputusan ekonomi, sosial, maupun politik serta merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran dan/atau barang pada tingkat satuan kerja.

Laporan Keuangan SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR (BIRO ORGANISASI) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 ini telah disusun serta disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual serta kaidah-kaidah pengelolaan keuangan dilingkungan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat.

1.2 Landasan Hukum penyusunan Laporan Keuangan.

Laporan keuangan SKPD SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR (BIRO ORGANISASI) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 ini diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan daerah, antara lain :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Tahun 2013 Nomor 1425);
1. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3);
1. Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua Pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 106);

1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan

Setiap Pos dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Dalam realisasinya mengacu pada kebijakan akuntansi yang mengatur penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan daerah dan penggunaan sumber daya ekonomis yang dipercayakan, dengan pengungkapan-pengungkapan dan informasi tambahan lainnya yang diharapkan mempermudah para pengguna untuk memahami penjelasan pos-pos laporan keuangan SKPD SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR (BIRO ORGANISASI) Provinsi Kalimantan Barat.

Karena itu penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR (BIRO ORGANISASI) Provinsi Kalimantan Barat tahun anggaran 2020, terdiri dari :

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan SKPD
- 1.2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPD
- 1.3. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan SKPD

Bab II Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan

- 2.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan

2.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target.

Bab III Penjelasan pos-pos laporan keuangan.

3.1 Rincian dan penjelasan masing - masing pos-pos pelaporan keuangan.

3.1.
1. Laporan Realisasi Anggaran

3.1.
2. Laporan Operasional

3.1.
3. Neraca

3.1.
4. Laporan Perubahan Ekuitas

Bab IV Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan.

Bab V Penutup.

BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

2.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan.

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI	BERLEBIH/ (BERKURANG) (Rp.)	%
5.01.01	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR				
5.01.01.04	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR (BIRO ORGANISASI)				
	BELANJA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR (BIRO ORGANISASI)	2.296.416.539,00	2.202.436.000,00	(93.980.539,00)	95.90
	BELANJA LANGSUNG	2.296.416.539,00	2.202.436.000,00	(93.980.539,00)	95.90
5.01.5.01.01.04 .01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	283.181.695,00	266.210.300,00	(16.971.395,00)	94.00
5.01.5.01.01.04 .02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	108.210.500,00	106.263.700,00	(1.946.800,00)	98.20
5.01.5.01.01.04 .05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	18.974.700,00	18.956.100,00	(18.600,00)	99.90
5.01.5.01.01.04 .06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	207.038.800,00	200.300.050,00	(6.738.750,00)	96.74
5.01.5.01.01.04 .07	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH	13.004.000,00	12.962.000,00	(42.000,00)	99.67

5.01.5.01.01.04 .15	PROGRAM PENGEMBANGAN PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS PENYELENGGRAAN PEMERINTAHAN	338.414.994,00	326.584.300,00	(11.830.694,00)	96.50
5.01.5.01.01.04 .16	PROGRAM PENATAAN KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH	337.710.300,00	323.248.500,00	(14.461.800,00)	95.71
5.01.5.01.01.04 .17	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	343.411.500,00	321.336.500,00	(22.075.000,00)	93.57
5.01.5.01.01.04 .18	PROGRAM PENATAAN KETATALAKSANAAN	140.865.400,00	134.265.400,00	(6.600.000,00)	95.31
5.01.5.01.01.04 .19	PROGRAM PENINGKATAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR	465.310.150,00	452.414.650,00	(12.895.500,00)	97.22
5.01.5.01.01.04 .21	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN BAHAN PUSTAKA	40.294.500,00	39.894.500,00	(400.000,00)	99.00

2.1. Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target

Adapun Hambatan dan Kendala yang ada pada program-program kegiatan SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR (BIRO ORGANISASI) Provinsi Kalimantan Barat dalam pencapaian target kurang dari 75%, dapat dijelaskan sebagai berikut :

No	PROGRAM KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI	%	HAMBATAN DAN KENDALA DALAM PENCAPAIAN TARGET KURANG DARI 75%
1	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	3.500.000,00	2.537.100,00	72,48	Tidak ada Hambatan/Kendala hanya terdapat sisa uang pajak Kendaraan Bermotor untuk 4 Unit Kendaraan Dinas/ Operasional.

No	PROGRAM KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI	%	HAMBATAN DAN KENDALA DALAM PENCAPAIAN TARGET KURANG DARI 75%
2	Penataan Kelembagaan UPT di Lingkungan Prov. Kalbar	45.611.200,00	32.771.200,00	71,84	Tidak terserapnya anggaran Narasumber dari Pemerintah Pusat dalam kegiatan Penataan UPT disebabkan karena pembentukan UPT Sertifikasi Tenaga Kerja belum dapat dilaksanakan mengingat masa pandemi dan belum tersedianya sarana dan prasarana UPT tersebut.

BAB III PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

3.1 Rincian dan Penjelasan masing-masing pos-pos laporan Keuangan.

3.1.1. Laporan Realisasi Anggaran

Reff	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Lebih / (Kurang) (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
-------------	---------------	-----------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------	----------	------------------------------------

Reff	Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	Lebih / (Kurang)	%	Realisasi 2019
		(Rp)	(Rp)	(Rp)		(Rp)
5	BELANJA DAERAH	2.296.416.539,00	2.202.436.000,00	(93.980.539,00)	95,91	2.822.434.850,00

Belanja pada SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR (BIRO ORGANISASI) Tahun Anggaran 2020 memiliki anggaran belanja sebesar Rp.2.296.416.539,00 dan realisasi belanja sebesar Rp.2.202.436.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi belanja Tahun Anggaran 2019 yang tercatat sebesar Rp. 2.822.434.850,00 terjadi penurunan sebesar Rp. (619.998.850,00) dengan rincian penjelasan sebagai berikut :

5.1	BELANJA OPERASI	2.288.916.539,00	2.194.936.000,00	(93.980.539,00)	95,89	2.822.434.850,00
5.2	BELANJA MODAL	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	0,00

5.1	BELANJA OPERASI	2.288.916.539,00	2.194.936.000,00	(93.980.539,00)	95,89	2.822.434.850,00
5.1.1	Belanja Pegawai	1.252.930.000,00	1.228.870.000,00	(24.060.000,00)	98,08	1.273.580.000,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.035.986.539,00	966.066.000,00	(69.920.539,00)	93,25	1.548.854.850,00
5.1.1	Belanja Pegawai	1.252.930.000,00	1.228.870.000,00	(24.060.000,00)	98,08	1.273.580.000,00

Belanja Pegawai pada SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR (BIRO ORGANISASI) Tahun Anggaran 2020 memiliki anggaran belanja sebesar Rp. 1.252.930.000,00 dan realisasi belanja sebesar Rp. 1.228.870.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi belanja Tahun Anggaran 2019 yang tercatat sebesar Rp.1.273.580.000,00 terjadi penurunan sebesar Rp. 44.710.000,00. Rincian Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut:

2.	Belanja Langsung	1.252.930.000,00	1.228.870.000,00	(24.060.000,00)	98,08	
	- Honorarium PNSD	1.252.930.000,00	1.228.870.000,00	(24.060.000,00)	98,08	

5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.035.986.539,00	966.066.000,00	(69.920.539,00)	93,25	1.548.854.850,00
--------------	--------------------------------	-------------------------	-----------------------	------------------------	--------------	-------------------------

Belanja Barang dan Jasa pada SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR (BIRO ORGANISASI) Tahun Anggaran 2020 memiliki anggaran belanja sebesar Rp. 1.035.986.539,00 dan realisasi belanja sebesar Rp. 966.066.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi belanja Tahun Anggaran 2019 yang tercatat sebesar Rp. 1.548.854.850,00 terjadi penurunan sebesar Rp. 582.788.850,00. Rincian Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut:

1.	Belanja Bahan Pakai Habis	63.984.144,00	63.166.250,00	(817.894,00)	98,72	
2.	Belanja Bahan/Material	68.106.600,00	65.556.300,00	(2.550.300,00)	96,26	

3.	Belanja Jasa Kantor	30.000.000,00	27.024.350,00	(2.975.650,00)	90,08
4.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	46.970.500,00	45.811.400,00	(1.159.100,00)	97,53
5.	Belanja Cetak dan Penggandaan	79.487.900,00	70.648.000,00	(8.839.900,00)	88,88
6.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Lahan	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Belanja Makanan dan Minuman	196.915.000,00	164.260.000,00	(32.655.000,00)	83,42
10.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	40.000.000,00	39.975.000,00	(25.000,00)	99,94
11.	Belanja Perjalanan Dinas	205.412.395,00	198.215.300,00	(7.197.095,00)	96,50
12.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Belanja Pemeliharaan	34.960.000,00	33.709.400,00	(1.250.600,00)	96,42
14.	Belanja Jasa PNSD dan Non PNSD	204.150.000,00	191.700.000,00	(12.450.000,00)	93,90
15.	Uang Untuk diberikan Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat	66.000.000,00	66.000.000,00	0,00	100,00

5.2 BELANJA MODAL 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 0,00

BELANJA MODAL pada SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR (BIRO ORGANISASI) Tahun Anggaran 2020 memiliki anggaran belanja sebesar Rp. 7.500.000,00 dan realisasi belanja sebesar Rp. 7.500.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2019 yang tercatat sebesar Rp. 0,00 terjadi kenaikan sebesar Rp. 7.500.000,00. Rincian BELANJA MODAL Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut:

5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00
---	--------------	--------------	------	--------

3.1.2. Laporan Operasional

Reff	Uraian	Realisasi - LO 2020 (Rp)	Realisasi - LO 2019 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) % (Rp)	Realisasi - LRA 2020 (Rp)
-------------	---------------	---	---	--	--

Reff	Uraian	Realisasi - LO 2020 (Rp)	Realisasi - LO 2019 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	%	Realisasi - LRA 2020 (Rp)
9	BEBAN	2.315.443.915,0	2.917.122.501,0	(601.678.586,00	79,3	2.202.436.00
		0	0)	7	0,00
	9.1 BEBAN OPERASI - LO	2.315.443.915,00	2.917.122.501,00	(601.678.586,00)	79,3	2.194.936.000,00
	9.2 BEBAN TRANSFER	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00
9.1	BEBAN OPERASI - LO	2.315.443.915,0	2.917.122.501,0	(601.678.586,00	79,3	2.194.936.00
		0	0)	7	0,00
	9.1.1 Beban Pegawai - LO	1.228.870.000,00	1.273.580.000,00	(44.710.000,00)	96,4	1.228.870.000,00
					9	
	9.1.2 Beban Barang dan Jasa	966.066.000,00	1.548.029.850,00	(581.963.850,00)	62,4	966.066.000,00
					1	
	9.1.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi	120.507.915,00	87.836.053,14	32.671.861,86	137,	0,00
					20	
	9.1.8 Beban Lain - lain	0,00	7.676.597,86	(7.676.597,86)	0,00	0,00
9.1.1	Beban Pegawai - LO	1.228.870.000,0	1.273.580.000,0	(44.710.000,00)	96,4	1.228.870.00
		0	0)	9	0,00
	Beban Pegawai - LO pada SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR (BIRO ORGANISASI) Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 1.228.870.000,00 dan realisasi Beban Pegawai - LO Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 1.273.580.000,00 terjadi penurunan sebesar Rp. 44.710.000,00 atau 96,49%. Jika Beban Pegawai - LO pada SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR (BIRO ORGANISASI) Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 1.228.870.000,00 dibandingkan dengan realisasi Beban Pegawai - LRA sebesar Rp. 1.228.870.000,00 tidak terjadi perbedaan sebesar Rp. 0,00, dapat dijelaskan sebagai berikut :					
	- Beban Pegawai - LRA 2020	1.228.870.000,0				
		0				
	Belanja pegawai sebagai penambah kapitalisasi aset	0,00				
	Utang belanja pegawai Tahun Anggaran 2020	0,00				
	Utang belanja pegawai Tahun Anggaran 2019	0,00				
	Belanja Modal yang tidak diakui sebagai aset tetap	0,00				
	- Beban Pegawai - LO 2020	1.228.870.000,0				
		0				
9.1.2	Beban Barang dan Jasa	966.066.000,00	1.548.029.850,0	(581.963.850,00	62,4	966.066.000,
			0)	1	00

Beban Barang dan Jasa pada SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR (BIRO ORGANISASI) Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.966.066.000,00 dan realisasi Beban Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.1.548.029.850,00 terjadi penurunan sebesar Rp. (581.963.850,00) atau 62,41%. Jika Beban Barang dan Jasa pada SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR (BIRO ORGANISASI) Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.966.066.000,00 dibandingkan dengan realisasi Belanja Barang dan Jasa - LRA sebesar Rp. 966.066.000,00 tidak terjadi perbedaan sebesar Rp. 0,00, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1	Beban Barang dan Jasa	516.188.750,00	724.928.500,00	(208.739.750,00)	140,44	516.188.750,00
2	Beban Persediaan	217.952.550,00	162.138.050,00	55.814.500,00	74,39	217.952.550,00
3	Beban Pemeliharaan	33.709.400,00	26.897.000,00	6.812.400,00	79,79	33.709.400,00
4	Beban Perjalanan Dinas	198.215.300,00	634.066.300,00	(435.851.000,00)	319,89	198.215.300,00
1	Beban Barang dan Jasa	516.188.750,00	724.928.500,00	(208.739.750,00)	140,44	516.188.750,00

Jika Beban Barang dan Jasa pada SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR (BIRO ORGANISASI) Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.516.188.750,00 dibandingkan dengan realisasi Beban Barang dan Jasa - LRA sebesar Rp. 516.188.750,00 tidak terjadi perbedaan sebesar Rp. 0,00, dapat dijelaskan sebagai berikut :

-	Beban Barang dan Jasa - LRA 2020	516.188.750,00				
a.	Beban Barang dibayar dimuka Tahun Anggaran 2019	0,00				
b.	Beban Barang dibayar dimuka Tahun Anggaran 2020	0,00				
c.	Beban Jasa dibayar dimuka Tahun Anggaran 2019	0,00				
d.	Beban Jasa dibayar dimuka Tahun Anggaran 2020	0,00				
e.	Utang Barang dan Jasa 2019	0,00				
f.	Utang Barang dan Jasa 2020	0,00				
g.	Belanja Modal yang tidak diakui sebagai aset tetap	0,00				
h.	Belanja Barang dan Jasa sebagai penambah kapitalisasi aset	0,00				
i.	Belanja barang dan jasa BLUD	0,00				
j.	Persediaan BLUD Tahun 2020	0,00				
-	Beban Barang dan Jasa - LO 2020	516.188.750,00				

2	Beban Persediaan	217.952.550,00	162.138.050,00	55.814.500,00	74,39	217.952.550,00
----------	-------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	--------------	-----------------------

Jika Beban Persediaan pada SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR (BIRO ORGANISASI) Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.217.952.550,00 dibandingkan dengan realisasi Beban Persediaan - LRA sebesar Rp. 217.952.550,00 tidak terjadi perbedaan sebesar Rp. 0,00, dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Beban Persediaan - LRA 2020	217.952.550,00				
a. Persediaan Tahun Anggaran 2020	0,00				
b. Persediaan Tahun Anggaran 2019	0,00				
c. Persediaan Lainnya 2020	0,00				
d. Persediaan Lainnya 2019	0,00				
e. Belanja Modal yang tidak diakui sebagai aset tetap	0,00				
f. Belanja Persediaan yang menjadi Aset	0,00				
g. Utang Persediaan (belanja yang diserahkan) 2020	0,00				
h. Utang Persediaan (belanja yang diserahkan) 2019	0,00				
i. P3D dari Pemerintah Kab/Kota ke Pemerintah Provinsi	0,00				
j. P3D dari Pemerintah Provinsi ke Pemerintah Pusat	0,00				
k. Hibah dari Pihak Ketiga/Lainya	0,00				
- Beban Persediaan - LO 2020	217.952.550,00				

3	Beban Pemeliharaan	33.709.400,00	26.897.000,00	6.812.400,00	79,79	33.709.400,00
----------	---------------------------	----------------------	----------------------	---------------------	--------------	----------------------

Jika Beban Pemeliharaan pada SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR (BIRO ORGANISASI) Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.33.709.400,00 dibandingkan dengan realisasi Beban Pemeliharaan - LRA sebesar Rp. 33.709.400,00 tidak terjadi perbedaan sebesar Rp. 0,00, dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Beban Pemeliharaan - LRA 2020	33.709.400,00
a. Utang Pemeliharaan Tahun Anggaran 2020	0,00
b. Utang Pemeliharaan Tahun Anggaran 2019	0,00
c. Belanja Modal yang tidak masuk sebagai kapitalisasi aset	0,00

d. Belanja Pemeliharaan yang menjadi aset 0,00

- **Beban Pemeliharaan - LO 2020** 33.709.400,00

4 Beban Perjalanan Dinas 198.215.300,00 634.066.300,00 (435.851.000,00 319, 198.215.300,) 89 00

Beban Perjalanan Dinas pada SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR (BIRO ORGANISASI) Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.198.215.300,00 dibandingkan dengan realisasi Beban Perjalanan Dinas - LRA sebesar Rp. 198.215.300,00

- **Beban Perjalanan Dinas - LRA 2020** 198.215.300,00

a. Belanja Perjalanan dinas sebagai penambah kapitalisasi aset 0,00

b. Belanja Modal yang tidak diakui sebagai aset tetap 0,00

- **Beban Perjalanan Dinas - LO 2020** 198.215.300,00

9.1.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi 120.507.915,00 87.836.053,14 32.671.861,86 137, 20

Beban Penyusutan dan Amortisasi pada SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR (BIRO ORGANISASI) Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.120.507.915,00 dan realisasi Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.87.836.053,14 terjadi kenaikan sebesar Rp. 32.671.861,86 atau 137,20% dirincikan sebagai berikut :

1 Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin 120.507.915,00 87.836.053,14 32.671.861,86 137, 20

9.1.8 Beban Lain - lain 0,00 7.676.597,86 (7.676.597,86) 0,00

Beban Lain - lain pada SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR (BIRO ORGANISASI) Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.0,00 dan realisasi Beban Lain - lain Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.7.676.597,86 terjadi penurunan sebesar Rp. (7.676.597,86) atau 0,00% dirincikan sebagai berikut :

1 Beban Persediaan Lain-lain 0,00 7.676.597,86 (7.676.597,86)

3.1.3 Penjelasan atas Neraca

Komposisi dan Rasio perbandingan Neraca per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019 dapat dilihat sebagai berikut :

Reff	Penjelasan Neraca	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
1	ASET	537.458.432,00	442.684.183,00
	Aset merupakan salah satu pos yang termuat dalam Neraca Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Nilai Aset Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019 terdiri dari :		
	1.3 Aset Tetap	523.693.476,00	428.919.227,00
	1.4 Aset Lainnya	13.764.956,00	13.764.956,00
	Jumlah Aset	<u>537.458.432,00</u>	<u>442.684.183,00</u>
1.1	ASET LANCAR	0,00	0,00
	Aset lancar terdiri dari kas dan setara kas, dan aset yang diharapkan untuk segera direalisasikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Rincian dan perbandingan saldo Aset Lancar per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019 terdiri dari :		
1.1.1	Kas Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
	Kas di Bendahara Penerimaan merupakan pendapatan daerah yang masih berada di tangan Bendahara Penerimaan dan sampai dengan 31 Desember 2020 belum disetorkan ke Kas Daerah.		
	1. Pendapatan Yang Belum Disetor		0,00
	2. Uang Titipan		0,00
1.1.2	Kas Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang menjadi tanggung jawab/dikelola oleh Bendahara Pengeluaran dan sampai dengan 31 Desember 2020 belum disetor ke Kas Daerah termasuk di dalamnya adalah Kas yang masih terdapat pada Rekening Koran, kas yang berasal dari PPN dan PPH yang dipungut tetapi belum disetorkan.

1. Sisa Kas UP/GU/TU		0,00
2. Pajak di SKPD yang Belum Disetor		0,00
3. Uang Titipan		0,00
4. Jasa Giro		0,00
5. Kas Lainnya		0,00

1.1.3 Piutang Pendapatan 0,00 0,00

Piutang Pendapatan terdiri dari piutang pajak daerah dan piutang retribusi daerah.

1 Piutang Pajak Daerah	0,00	0,00
------------------------	------	------

Piutang pajak kendaraan bermotor disajikan berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah yang telah ditetapkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang belum terbayar sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.

2 Piutang Retribusi Daerah	0,00	0,00
----------------------------	------	------

Piutang retribusi dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan.

3 Piutang Lain-lain PAD yang Sah	0,00	0,00
----------------------------------	------	------

Piutang Lain-lain PAD yang Sah merupakan Piutang Denda Pajak, denda Retribusi dan Denda Pengembalian.

1.1.4 Piutang Lainnya **0,00** **0,00**

Piutang Lainnya adalah Piutang Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran terdiri dari Pembayaran Angsuran Rumah Dinas Provinsi Kalimantan Barat dan Angsuran Kendaraan Dinas Provinsi Kalimantan Barat.

1 Angsuran Rumah Dinas	0,00	0,00
2 Angsuran Kendaraan Dinas	0,00	0,00
<hr style="border: 1px solid black;"/>		
Jumlah Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	0,00	0,00

1.1.5 Penyisihan Piutang **0,00** **0,00**

Penyisihan Piutang Pendapatan terdiri dari penyisihan piutang pajak dan penyisihan piutang retribusi.

1 Penyisihan Piutang Pajak	0,00	0,00
----------------------------	------	------

Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dengan ketentuan:

- a. Kualitas Piutang Lancar; dengan kriteria umur piutang kurang dari 1 tahun; Taksiran Piutang Tak Tertagih 0,5%.
- b. Kualitas Piutang Kurang Lancar; dengan kriteria umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; Taksiran Piutang Tak Tertagih 10 %.
- c. Kualitas Piutang Diragukan; dengan kriteria umur piutang 2 sampai dengan 5 tahun; Taksiran Piutang Tak Tertagih 50 %.
- d. Kualitas Piutang Macet. dengan kriteria umur piutang diatas 5 tahun; Taksiran Piutang Tak Tertagih 100 %.

2 Penyisihan Piutang Retribusi	0,00	0,00
--------------------------------	------	------

Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak Khusus untuk objek Retribusi, dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:

- a. Kualitas Lancar, jika umur piutang 0 sampai dengan 1 bulan; Taksiran Piutang Tak Tertagih 0,5%.
- b. Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang 1 sampai dengan 3 bulan; Taksiran Piutang Tak Tertagih 10 %.
- c. Kualitas Diragukan, jika umur piutang 3 sampai dengan 12 bulan; Taksiran Piutang Tak Tertagih 50 %.
- d. Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 12 bulan; Taksiran Piutang Tak Tertagih 100 %.

3 Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	0,00	0,00
---	------	------

Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak Khusus untuk objek Lain-lain PAD yang Sah, dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:

- a. Kualitas Lancar, jika umur piutang 0 sampai dengan 1 bulan; Taksiran Piutang Tak Tertagih 0,5%.
- b. Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang 1 sampai dengan 3 bulan; Taksiran Piutang Tak Tertagih 10 %.
- c. Kualitas Diragukan, jika umur piutang 3 sampai dengan 12 bulan; Taksiran Piutang Tak Tertagih 50 %.
- d. Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 12 bulan; Taksiran Piutang Tak Tertagih 100 %.

1.1.6 Beban Dibayar Dimuka 0,00 0,00

Beban dibayar dimuka terdiri dari Beban Jasa Dibayar Dimuka (asuransi dibayar dimuka dan Sewa gedung)

1 Asuransi dibayar dimuka	0,00	0,00
2 Sewa gedung	0,00	0,00
Jumlah Beban dibayar dimuka	0,00	0,00

1.1.7 Persediaan 0,00 0,00

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, dan barang-barang yang dimaksud untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Aset tetap Peralatan dan Mesin yang tidak memenuhi kriteria batasan minimal kapitalisasi aset tetap yaitu sebesar sama dengan atau lebih dari Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) tetapi barang tersebut memiliki manfaat ekonomi barang lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dipergunakan untuk operasional pemerintahan serta tidak untuk dijual.

1 Persediaan Bahan Pakai Habis	0,00	0,00
2 Persediaan Bahan/ Material	0,00	0,00
3 Persediaan Barang Lainnya	0,00	0,00
Jumlah Persediaan	0,00	0,00

1.2 INVESTASI JANGKA PANJANG 0,00 0,00

Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.

1.3	ASET TETAP	523.693.476,00	428.919.227,00
------------	-------------------	-----------------------	-----------------------

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintahan daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Rincian dan perbandingan saldo Aset Tetap per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019 terdiri dari :

1.3.1 Tanah		0,00	0,00
1.3.2 Peralatan dan Mesin		2.081.251.937,00	1.859.553.278,00
1.3.3 Gedung dan Bangunan		0,00	0,00
1.3.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan		0,00	0,00
1.3.5 Aset Tetap Lainnya		279.037.515,00	279.037.515,00
1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan		0,00	0,00
1.3.7 Akumulasi Penyusutan		(1.836.595.976,00)	(1.709.671.566,00)
Jumlah Aset Tetap		523.693.476,00	428.919.227,00

1.3.1	Tanah	0,00	0,00
--------------	--------------	-------------	-------------

1	Aset Tetap Tanah Per 31 Desember 2019	0,00	
2	Mutasi Bertambah	0,00	
	2.1 Realisasi Belanja Modal	0,00	
	2.2 Hibah		
	2.3 Beban		
	2.4 Mutasi Antar SKPD		
	2.5 Reklas		
	2.6 Revaluasi		
	2.7 Koreksi		
3	Mutasi Berkurang	0,00	
	3.1 Hibah		
	3.2 Penghapusan		
	3.3 Mutasi Antar SKPD		
	3.4 Reklas		
	3.5 Revaluasi		

3.6 Koreksi		
3.7 Rusak Berat		
3.8 Beban		
5 Aset Tetap Tanah Per 31 Desember 2020	0,00	
1.3.2 Peralatan dan Mesin	2.081.251.937,00	1.859.553.278,00
1 Aset Tetap Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2019	1.859.553.278,00	
2 Mutasi Bertambah	221.698.659,00	
2.1 Realisasi Belanja Modal	7.500.000,00	
2.2 Hibah		
2.3 Beban		
2.4 Mutasi Antar SKPD		
Mutasi Masuk dari SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR Berdasarkan BAST Nomor : 027/85/Umum/2020 tanggal 28 Mei 2020	6.416.500,00	
Mutasi Masuk dari SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR Berdasarkan BAST Nomor : 027/50/Umum/2020 tanggal 14 April 2020, Nomor : 027/187/UMUM/2020 tanggal 29 Juni 2020, Nomor : 027/402/UMUM/2020 tanggal 27 Agustus 2020, Nomor : 027/729/UMUM/2020 tanggal 30 November 2020	207.782.159,00	
2.5 Reklas		
2.6 Revaluasi		
2.7 Koreksi		
3 Mutasi Berkurang	0,00	
3.1 Hibah		
3.2 Penghapusan		

3.3 Mutasi Antar SKPD		
3.4 Reklas		
3.5 Revaluasi		
3.6 Koreksi		
3.7 Rusak Berat		
3.8 Ekstracomptable		
3.9 Beban		
5 Aset Tetap Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2020	2.081.251.937,00	
1.3.3 Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
1 Aset Tetap Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2019	0,00	
2 Mutasi Bertambah	0,00	
2.1 Realisasi Belanja Modal	0,00	
2.2 Hibah		
2.3 Beban		
2.4 Mutasi Antar SKPD		
2.5 Reklas		
2.6 Revaluasi		
2.7 Koreksi		
3 Mutasi Berkurang	0,00	
3.1 Hibah		
3.2 Penghapusan		
3.3 Mutasi Antar SKPD		
3.4 Reklas		
3.5 Revaluasi		
3.6 Koreksi		
3.7 Rusak Berat		
3.8 Beban		
5 Aset Tetap Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2020	0,00	

1.3.4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00
1	Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Per 31 Desember 2019	0,00	
2	Mutasi Bertambah	0,00	
	2.1 Realisasi Belanja Modal	0,00	
	2.2 Hibah		
	2.3 Beban		
	2.4 Mutasi Antar SKPD		
	2.5 Reklas		
	2.6 Revaluasi		
	2.7 Koreksi		
3	Mutasi Berkurang	0,00	
	3.1 Hibah		
	3.2 Penghapusan		
	3.3 Mutasi Antar SKPD		
	3.4 Reklas		
	3.5 Revaluasi		
	3.6 Koreksi		
	3.7 Rusak Berat		
	3.8 Beban		
5	Aset Tetap Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Per 31 Desember 2020	0,00	
1.3.5	Aset Tetap Lainnya	279.037.515,00	279.037.515,00
1	Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2019	279.037.515,00	
2	Mutasi Bertambah	0,00	
	2.1 Realisasi Belanja Modal	0,00	
	2.2 Hibah		
	2.3 Beban		

2.4 Mutasi Antar SKPD			
2.5 Reklas			
2.6 Revaluasi			
2.7 Koreksi			
3 Mutasi Berkurang		0,00	
3.1 Hibah			
3.2 Penghapusan			
3.3 Mutasi Antar SKPD			
3.4 Reklas			
3.5 Revaluasi			
3.6 Koreksi			
3.7 Rusak Berat			
3.8 Beban			
5 Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2020		279.037.515,00	
1.3.6 Kontruksi Dalam Pengerjaan		0,00	0,00
1 Aset Tetap Kontruksi Dalam Pengerjaan Per 31 Desember 2019		0,00	
2 Mutasi Bertambah		0,00	
2.1 Realisasi Belanja Modal		0,00	
2.2 Hibah			
2.3 Beban			
2.4 Mutasi Antar SKPD			
2.5 Reklas			
2.6 Revaluasi			
2.7 Koreksi			
3 Mutasi Berkurang		0,00	
3.1 Hibah			
3.2 Penghapusan			

3.3 Mutasi Antar SKPD	
3.4 Reklas	
3.5 Revaluasi	
3.6 Koreksi	
3.7 Rusak Berat	
3.8 Beban	
5 Aset Tetap Kontruksi Dalam Pengerjaan Per 31 Desember 2020	0,00

1.3.7 Akumulasi Penyusutan (1.836.595.976,00) (1.709.671.566,00)

Akumulasi Penyusutan adalah Penyajian kembali nilai buku aset tetap terdiri dari Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin, Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan dan Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan jaringan, rincian penjelasan sebagai berikut :

1 Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(1.836.595.976,00)	(1.709.671.566,00)
- Per 31 Desember 2019	(1.709.671.566,00)	
- Koreksi	(6.416.495,00)	
- Setelah Koreksi	(1.716.088.061,00)	
- Penyusutan tahun 2020	(120.507.915,00)	
- Per 31 Desember 2020	(1.836.595.976,00)	
2 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
- Per 31 Desember 2019	0,00	
- Koreksi	0,00	
- Setelah Koreksi	0,00	
- Penyusutan tahun 2020	0,00	
- Per 31 Desember 2020	0,00	
3 Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00
- Per 31 Desember 2019	0,00	
- Koreksi	0,00	
- Setelah Koreksi	0,00	
- Penyusutan tahun 2020	0,00	
- Per 31 Desember 2020	0,00	

1.4	ASET LAINNYA	13.764.956,00	13.764.956,00
	Rincian dan perbandingan saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019 terdiri dari :		
	1.4.4 Aset Lain-lain	13.764.956,00	13.764.956,00
	Jumlah Aset Lainnya	<u>13.764.956,00</u>	<u>13.764.956,00</u>
1.4.1	Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00
	Tagihan Jangka Panjang terdiri dari tagihan penjualan angsuran dan tuntutan ganti kerugian daerah		
	1 Tagihan Penjualan Angsuran	0,00	0,00
	2 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0,00	0,00
1.4.2	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
	Kemitraan dengan Pihak Ketiga terdiri dari sewa, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna		
	1 Sewa	0,00	0,00
	2 Kerjasama Pemanfaatan	0,00	0,00
	3 Bangun Guna Serah	0,00	0,00
	4 Bangun Serah Guna	0,00	0,00
1.4.3	Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00
	1 Aset Tidak Berwujud Lainnya	0,00	0,00
	- Aset Tidak Berwujud Lainnya Per 31 Desember 2019	0,00	
	- Mutasi Bertambah	0,00	
	1.1 Realisasi Belanja Modal	0,00	
	1.2 Beban		
	1.3 Atribusi		

1.4 Hibah Pemerintah Lainnya		
1.5 Pengalihan antar OPD		
1.6 Pengalihan antar fungsi		
1.7 Revaluasi		
1.8 Reklas		
1.9 BLUD		
- Mutasi Berkurang	0,00	
1.10 Hibah Pemerintah Lainnya	0,00	
1.11 Penghapusan		
1.12 Pengalihan antar OPD		
1.13 Pengalihan antar Fungsi		
1.14 Rusak Berat		
1.15 Revaluasi		
1.16 Reklas		
1.17 Beban		
1.18 Extracomptable		
- Aset Tidak Berwujud Per 31 Desember 2020	0,00	
2 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00
1.4.4 Aset Lain-lain	13.764.956,00	13.764.956,00
1 Aset Lain Lain Per 31 Desember 2019	13.764.956,00	
2 Mutasi Bertambah	0,00	
2.1 Realisasi Belanja Modal	0,00	
2.2 Beban		
2.3 Atribusi		
2.4 Hibah Pemerintah Lainnya		
2.5 Pengalihan antar OPD		
2.6 Pengalihan antar fungsi		
2.7 Revaluasi		

	2.8 Reklas		
	2.9 Rusak Berat		
3	Mutasi Berkurang	0,00	
	3.1 Hibah Pemerintah Lainnya		
	3.2 Penghapusan		
	3.3 Pengalihan antar OPD		
	3.4 Pengalihan antar Fungsi		
	3.5 Rusak Berat		
	3.6 Revaluasi		
	3.7 Reklas		
	3.8 Beban		
	3.9 Extracomptable		
5	Aset Lain Lain Per 31 Desember 2020	13.764.956,00	
2	KEWAJIBAN	0,00	0,00
	2.1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga	0,00	0,00
	2.1.1 Utang PPh Pusat	0,00	0,00
	2.1.1.1 PPH21		
	2.1.1.2 PPH22		
	2.1.1.3 PPH23		
	2.1.1.4 PPH4		
	2.1.2 Utang PPN Pusat	0,00	0,00
	2.1.2.1 PPN		
	2.1.3 Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya	0,00	0,00
	2.2 Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00
	2.2.1 Pendapatan Diterima Dimuka lainnya	0,00	0,00
	2.3 Utang Belanja	0,00	0,00
	2.3.1 Utang Belanja Pegawai	0,00	0,00

2.3.1.1 Gaji dan Tunjangan		
2.3.1.2 Tambahan Penghasilan PNS		
2.3.1.3 Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH		
2.3.1.4 Biaya Pemungutan Pendapatan Daerah		
2.3.1.5 Insentif Pemungutan Pajak Daerah		
2.3.1.6 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah		
2.3.1.7 Honorarium PNSD		
2.3.1.8 Honorarium Non PNSD		
2.3.1.9 Honorarium Pengelola Dana BOS		
2.3.1.10 Jasa Pelayanan Kesehatan		
2.3.1.11 Belanja Pegawai BLUD		
2.3.2 Utang Belanja Barang Jasa	0,00	0,00
2.3.2.1 Belanja Bahan Pakai Habis		
2.3.2.2 Belanja Bahan/Material		
2.3.2.3 Belanja Bahan Jasa Kantor		
2.3.2.4 Belanja Premi Asuransi		
2.3.2.5 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor		
2.3.2.6 Belanja Cetak Dan Pengadaan		
2.3.2.7 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Lahan		
2.3.2.8 Belanja Sewa Sarana Mobilitas		
2.3.2.9 Belanja Sewa Alat Berat		
2.3.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan		
2.3.2.11 Belanja Makanan dan Minuman		

2.3.2.12 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya		
2.3.2.13 Belanja Pakaian Kerja		
2.3.2.14 Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu		
2.3.2.15 Belanja Perjalanan Dinas		
2.3.2.16 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS		
2.3.2.17 Belanja kursus, latihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis PNS		
2.3.2.18 Belanja Pemeliharaan		
2.3.2.19 Belanja Jasa Konsultasi		
2.3.2.20 Belanja Barang Dana BOS		
2.3.2.21 Belanja Hibah Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat /Pihak Ketiga/ Pemerintah/ Pemerintah Daerah		
2.3.2.22 Belanja Beasiswa Pendidikan Non PNS		
2.3.2.23 Belanja Jasa PNSD dan Non PNSD		
2.3.2.24 Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat		
2.3.2.25 Belanja Barang dan Jada BLUD		
2.3.2.26 Belanja Bantuan Sosial Barang		
2.3.3 Utang Belanja Modal	0,00	0,00
2.3.3.1 Belanja Tanah		
2.3.3.2 Belanja Peralatan Dan Mesin		
2.3.3.3 Belanja Gedung dan Bangunan		
2.3.3.4 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan		
2.3.3.5 Belanja Aset Tetap Lainnya		
2.3.3.6 Belanja Aset Lainnya		

Jumlah Kewajiban	0,00	0,00
------------------	------	------

3	EKUITAS	537.458.432,00	442.684.183,00
----------	----------------	-----------------------	-----------------------

Pada Neraca per 31 Desember 2020 Ekuitas sebesar 537.458.432,00 sedangkan pada Neraca per 31 Desember 2019 saldo Ekuitas sebesar 442.684.183,00

TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	537.458.432,00	442.684.183,00
---	-----------------------	-----------------------

3.1.4 Penjelasan atas Laporan Perubahan Ekuitas

1 Ekuitas Awal	(16.116.076.817,00)
2 Surplus/ Defisit - LO	(2.315.443.915,00)
2.1 Surplus/defisit kegiatan operasional	(2.315.443.915,00)
2.2 Surplus/defisit kegiatan Non operasional	0,00
2.3 Pos Luar Biasa	0,00

3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan mendasar :

Koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, seperti:

3.1 Koreksi Nilai Persediaan 0,00

Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode

3.2 Selisih Revaluasi Aset Tetap 0,00

Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.

3.3 Lain - lain 207.782.164,00

Transaksi yang mempengaruhi perubahan pada Ekuitas

a. Penyisihan Piutang	0,00
b. Koreksi Penyusutan	5,00
c. Hibah Keluar	0,00
d. Mutasi Masuk Aset OPD	207.782.159,00
e. Mutasi Keluar Aset OPD	0,00
f. Penghapusan TPTGR	0,00
g. Perubahan Kode Rekening	0,00
h. Koreksi Tanah	0,00
i. Koreksi Utang Belanja	0,00
j. Reklass Antar Akun	0,00
k. Tagihan Penjualan Angsuran	0,00
l. Penyertaan Modal	0,00
m. Persediaan APBN yang belum	0,00

n. Aset peralatan dan mesin reklas ke persediaan lain-lain	0,00
o. Koreksi Dana Transfer Pemerintah Pusat	0,00
p. Koreksi Gedung dan Bangunan	0,00
q. Koreksi Persediaan	0,00
r. Koreksi Kas	0,00
s. Extracomptable	0,00
t. Koreksi Peralatan Dan Mesin	0,00
u. Koreksi Jaringan Irigasi Jembatan	0,00
v. Koreksi Aset Tetap Lainnya	0,00
4 Ekuitas Akhir	(18.223.738.568,00)

BAB IV. PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR (BIRO ORGANISASI) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 untuk Informasi Non Keuangan dapat dijelaskan sebagai berikut :

4.1 Gambaran Umum

Biro Organisasi merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang berada dibawah lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Biro Organisasi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 77 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, tugas Biro Organisasi adalah merumuskan dan mengkoordinasikan kebijakan daerah di bidang kelembagaan perangkat daerah dan analisis jabatan, ketatalaksanaan, serta reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja.

4.2 Tugas Pokok dan Fungsi

4.1 Tugas Pokok dan Fungsi. a. Tugas Pokok Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Biro Organisasi mempunyai tugas merumuskan dan mengkoordinasikan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, ketatalaksanaan, serta Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja. b. Fungsi Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Biro Organisasi mempunyai fungsi sebagai berikut : a. Perumusan program kerja di bidang organisasi; b. perumusan kebijakan pemerintah daerah di bidang kelembagaan perangkat daerah, analisis jabatan, ketatalaksanaan, serta reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; c. penyelenggaraan kegiatan urusan pemerintah provinsi di bidang kelembagaan perangkat daerah, analisis jabatan, ketatalaksanaan, serta reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; d. pengkoordinasian dan fasilitasi kebijakan perangkat daerah di bidang kelembagaan perangkat daerah, analisis jabatan, ketatalaksanaan, serta reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; e. pengendalian kegiatan di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, ketatalaksanaan, serta reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; f. pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan organisasi perangkat daerah pada Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; g. pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan berkenaan dengan kebijakan pemerintah daerah di bidang kelembagaan, analisis jabatan, ketatalaksanaan, serta reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap tugas dan fungsi di bidang organisasi berdasarkan program kerja yang telah ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan i. pelaksanaan fungsi lain di bidang organisasi yang diserahkan oleh Gubernur atau Sekretaris Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.3 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2019 pada Lampiran IV tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Susunan Organisasi Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat terdiri dari : 1. Kepala Biro 2. Bagian Kelembagaan dan analisis jabatan 3. Bagian Ketatalaksanaan 4. Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja 5. Kelompok Jabatan Fungsional Bagian Kelembagaan dan analisis jabatan membawahi : 1). Sub Bagian Kelembagaan Provinsi. 2). Sub Bagian Kelembagaan Kabupaten/Kota. 3). Sub Bagian Analisis Jabatan. Bagian Ketatalaksanaan membawahi : 1). Sub Bagian Tatalaksana Pemerintahan. 2). Sub Bagian Pelayanan Publik. 3). Sub Bagian Tata Usaha Biro. Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja membawahi : 1). Sub Bagian Reformasi Birokrasi. 2). Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja. 3). Sub Bagian Budaya Kerja.

4.4 Visi dan Misi

VISI : Terwujudnya Organisasi dan Manajemen Pemerintahan yang Modern Menuju Kepemerintahan Daerah yang Baik (Good Local Governance) MISI : 1. Melaksanakan penataan kelembagaan perangkat daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang efisien, efektif dan proporsional sesuai dengan kewenangan, karakteristik, potensi dan kemampuan daerah dalam rangka mendukung peningkatan pembangunan masyarakat; 2. Mewujudkan ketatalaksanaan yang efisien dan efektif sesuai dengan dinamika perubahan; 3. Mewujudkan pendayagunaan aparatur yang sistemik; 4. Mengimplementasikan prinsip-prinsip pemerintahan daerah yang baik (good local governance)

4.5 Extracomptable	Tahun 2020	Tahun 2019
a. Persediaan Lain-lain	0,00	0,00
b. Aset Tetap	32.837.030,00	30.529.030,00

Pontianak, 31 Desember 2020
Kepala Biro Organisasi Setda Prov.KALBAR



RIKA HASTARITA, S.Sos, M.Si
NIP. 19791208 200003 2 002

BAB V. PENUTUP

Catatan atas Laporan Keuangan SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR (BIRO ORGANISASI) Provinsi Kalimantan Barat tahun anggaran 2020 ini disusun sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah dan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 15 tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah setiap SKPD wajib menyampaikan laporan keuangan akhir tahun terdiri : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Demikian laporan keuangan ini kami susun dengan harapan semoga dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas kepada para pihak yang terkait dan semoga dapat menjadi sumber informasi dalam penyusunan laporan keuangan di tingkat Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tahun anggaran 2020.

Pontianak, 31 Desember 2020
Kepala Biro Organisasi Setda Prov. KALBAR



RINTA HASTARTITA, S.Sos, M.Si

ANALISIS
PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2020
SKPD : 5.01.01.04 - SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR (BIRO ORGANISASI)

a. ANALISIS VERTIKAL	
1) Analisis vertikal dalam LRA	
Uraian	Persamaan
Surplus/Defisit LRA tahun berjalan harus sama dengan total pendapatan dikurangi total belanja	Surplus/Defisit = Total Pendapatan - Total Belanja
RUMUS	
SURPLUS/DEFISIT LRA THN BERJALAN	: (2.202.436.000,00)
TOTAL PENDAPATAN	: 0,00
TOTAL BELANJA DAN TRANSFER	: 2.202.436.000,00
Selisih	: 0,00
2) Analisis vertikal dalam Neraca	
Uraian	Persamaan
Aset harus sama dengan total kewajiban ditambah dengan total ekuitas	Aset = Kewajiban + Ekuitas
RUMUS	
ASET	: 537.458.432,00
KEWAJIBAN	: 0,00
EKUITAS	: 537.458.432,00
Selisih	: 0,00

Kas di Bendahara Pengeluaran harus sama dengan sisa Uang Persediaan yang belum disetor ke kasda ditambah dengan Utang PFK di Bendahara Pengeluaran yang belum disetor ke kas negara.

Kas di Bendahara Pengeluaran = Sisa Uang Persediaan yang Belum Disetor + Utang PFK di Bendahara Pengeluaran

RUMUS		
KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN	:	0,00
SISA UANG PERSEDIAAN BELUM SETOR	:	0,00
UTANG PFK DI BENDAHARA PENGELUARAN	:	0,00
Selisih	:	0,00

3) Analisis vertikal dalam Laporan Operasional(LO)

Uraian	Persamaan	
Surplus/Defisit LO harus sama dengan total Pendapatan(LO) dikurangi total Beban(LO) ditambah (dikurangi) total Surplus (Defisit) Kegiatan Non Operasional(LO) ditambah (dikurangi) Pos Luar Biasa(LO)	Surplus/Defisit LO = Total Pendapatan(LO) - Total Beban(LO) +/- Total Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional(LO) +/- Pos Luar Biasa(LO)	
RUMUS		
SURPLUS(DEFISIT) LO	:	(2.315.443.915,00)
TOTAL PENDAPATAN(LO)	:	0,00
TOTAL BEBAN(LO)	:	(2.315.443.915,00)
TOTAL SURPLUS(DEFISIT)KEGIATAN NON OPERASIONAL	:	0,00
TOTAL POS LUAR BIASA	:	0,00
Selisih	:	0,00

4) Analisis vertikal dalam Laporan Perubahan Ekuitas

Uraian	Persamaan
Ekuitas akhir harus sama dengan ekuitas awal ditambah(dikurangi) surplus/defisit LO ditambah(dikurangi) koreksi berdampak ke ekuitas	Ekuitas akhir = ekuitas awal(+/-) surplus/defisit LO(+/-) koreksi berdampak ke ekuitas

RUMUS		
Ekuitas Akhir	:	(18.223.738.568,00)
Ekuitas Awal	:	(16.116.076.817,00)
Surplus/defisit LO	:	(2.315.443.915,00)
Koreksi	:	207.782.164,00
	:	0,00

b. ANALISIS HORIZONTAL

1) Analisis horizontal antara LRA dan Neraca

Realisasi belanja modal harus sama dengan penambahan aset tetap (dan aset lainnya), jika selisih harus dijelaskan di CALK		Teliti apakah pengungkapan selisih dalam CalK sudah cukup memadai. Mungkinin ada penerimaan hibah berupa aset dan kapitalisasi biaya. Atau ada kesalahan berupa: salah anggaran selain BM ternyata menghasilkan aset atau aset daerah yang baru ditemukan
RUMUS		
REALISASI BELANJA MODAL TANAH	:	0,00
PENAMBAHAN(PENURUNAN)	:	0,00
- ASET TANAH 2020	:	0,00
- ASET TANAH 2019	:	0,00
	:	0,00
Realisasi belanja modal harus sama dengan penambahan aset tetap (dan aset lainnya), jika selisih harus dijelaskan di CALK		Teliti apakah pengungkapan selisih dalam CalK sudah cukup memadai. Mungkinin ada penerimaan hibah berupa aset dan kapitalisasi biaya. Atau ada kesalahan berupa: salah anggaran selain BM ternyata menghasilkan aset atau aset daerah yang baru ditemukan
RUMUS		
REALISASI BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	:	7.500.000,00

PENAMBAHAN(PENURUNAN)	:	221.698.659,00
- ASET PERALATAN DAN MESIN 2020	:	2.081.251.937,00
- ASET PERALATAN DAN MESIN 2019	:	1.859.553.278,00
Selisih	:	(214.198.659,00)
<p>1. Mutasi Masuk dari SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR Berdasarkan BAST Nomor : 027/50/Ummum/2020 tanggal 14 April 2020, Nomor : 027/187/UMUM/2020 tanggal 29 Juni 2020, Nomor : 027/402/UMUM/2020 tanggal 27 Agustus 2020, Nomor : 027/729/UMUM/2020 tanggal 30 November 2020 senilai (Rp 207.782.159,00)</p> <p>2. Mutasi Masuk dari SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR Berdasarkan BAST Nomor : 027/85/Ummum/2020 tanggal 28 Mei 2020 senilai (Rp 6.416.500,00)</p>		
Realisasi belanja modal harus sama dengan penambahan aset tetap (dan aset lainnya), jika selisih harus dijelaskan di CALK		Teliti apakah pengungkapan selisih dalam CalK sudah cukup memadai. Mungkin ada penerimaan hibah berupa aset dan kapitalisasi biaya. Atau ada kesalahan berupa: salah anggaran selain BM ternyata menghasilkan aset atau aset daerah yang baru ditemukan
RUMUS		
REALISASI BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN	:	0,00
PENAMBAHAN(PENURUNAN)	:	0,00
- ASET GEDUNG DAN BANGUNAN 2020	:	0,00
- ASET GEDUNG DAN BANGUNAN 2019	:	0,00
Selisih	:	0,00
Realisasi belanja modal harus sama dengan penambahan aset tetap (dan aset lainnya), jika selisih harus dijelaskan di CALK		Teliti apakah pengungkapan selisih dalam CalK sudah cukup memadai. Mungkin ada penerimaan hibah berupa aset dan kapitalisasi biaya. Atau ada kesalahan berupa: salah anggaran selain BM ternyata menghasilkan aset atau aset daerah yang baru ditemukan
RUMUS		
REALISASI BELANJA MODAL JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	:	0,00
PENAMBAHAN(PENURUNAN)	:	0,00

- ASET JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN 2020	:	0,00	
- ASET JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN 2019	:	0,00	
Selisih	:	0,00	Teliti apakah pengungkapan selisih dalam CaLK sudah cukup memadai. Mungkin ada penerimaan hibah berupa aset dan kapitalisasi biaya. Atau ada kesalahan berupa: salah anggaran selain BM ternyata menghasilkan aset atau aset daerah yang baru ditemukan
Realisasi belanja modal harus sama dengan penambahan aset tetap (dan aset lainnya), jika selisih harus dijelaskan di CaLK			
RUMUS			
REALISASI BELANJA MODAL ASET TETAP LAINNYA	:	0,00	
PENAMBAHAN(PENURUNAN)	:	0,00	
- ASET TETAP LAINNYA 2020	:	279.037.515,00	
- ASET TETAP LAINNYA 2019	:	279.037.515,00	
Selisih	:	0,00	Teliti apakah pengungkapan selisih dalam CaLK sudah cukup memadai. Mungkin ada penerimaan hibah berupa aset dan kapitalisasi biaya. Atau ada kesalahan berupa: salah anggaran selain BM ternyata menghasilkan aset atau aset daerah yang baru ditemukan
RUMUS			
REALISASI BELANJA MODAL ASET LAINNYA	:	0,00	
PENAMBAHAN(PENURUNAN)	:	0,00	
- ASET LAINNYA 2020	:	13.764.956,00	
- ASET LAINNYA 2019	:	13.764.956,00	
Selisih	:	0,00	

2) Analisis horizontal antara LO, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca

Ekuitas Awal pada Laporan Perubahan Ekuitas harus sama dengan Ekuitas Akhir pada Neraca Tahun Sebelumnya	Ekuitas Awal pada Laporan Perubahan Ekuitas = Ekuitas Akhir pada Neraca Tahun Sebelumnya
RUMUS	
EKUITAS AWAL(LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS)	: (16.116.076.817,00)
EKUITAS AKHIR TAHUN SEBELUMNYA (NERACA)	: (16.116.076.817,00)
Selisih	0,00
Surplus/Defisit pada Laporan Operasional harus sama dengan Surplus/Defisit pada Laporan Perubahan Ekuitas	Surplus/Defisit pada Laporan Operasional = Surplus/Defisit pada Laporan Perubahan Ekuitas
RUMUS	
SURPLUS/DEFISIT (LAPORAN OPERASIONAL)	: (2.315.443.915,00)
SURPLUS/DEFISIT (LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS)	: (2.315.443.915,00)
Selisih	0,00
Ekuitas Akhir pada Laporan Perubahan Ekuitas harus sama dengan Ekuitas pada Neraca	Ekuitas Akhir pada Laporan Perubahan Ekuitas = Ekuitas pada Neraca
RUMUS	
EKUITAS AKHIR(LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS)	: (18.223.738.568,00)
EKUITAS (NERACA)	: (18.223.738.568,00)
Selisih	0,00
3) Analisis horizontal antara LO,LRA dan Neraca	
Pendapatan Pajak (LO) harus sama dengan Pendapatan Pajak (LRA) dikurangi Piutang Pajak Awal Tahun ditambah Piutang Pajak Akhir Tahun	Pendapatan Pajak (LO) = Pendapatan Pajak (LRA) - Piutang Pajak Awal Tahun + Piutang Pajak Akhir Tahun
RUMUS	
PENDAPATAN PAJAK (LO)	: 0,00

PENDAPATAN PAJAK (LRA)	:		0,00
PIUTANG PAJAK AKHIR TAHUN (NERACA)	:		0,00
PIUTANG PAJAK AWAL TAHUN (NERACA)	:		0,00
Selisih	:		0,00
Pendapatan Retribusi (LO) harus sama dengan Pendapatan Retribusi (LRA) dikurangi Piutang Retribusi Awal Tahun ditambah Piutang Retribusi Akhir Tahun			
RUMUS			
PENDAPATAN RETRIBUSI (LO)	:		0,00
PENDAPATAN RETRIBUSI (LRA)	:		0,00
PIUTANG RETRIBUSI AKHIR TAHUN (NERACA)	:		0,00
PIUTANG RETRIBUSI AWAL TAHUN (NERACA)	:		0,00
Selisih	:		0,00
Beban Persediaan (LO) harus sama dengan Belanja Barang dan Jasa Persediaan (LRA) ditambah Persediaan Awal Tahun dikurangi Persediaan Akhir Tahun			
RUMUS			
BEBAN PERSEDIAAN (LO)	:		217.952.550,00
BELANJA BARANG DAN JASA - PERSEDIAAN (LRA)	:		217.952.550,00
PERSEDIAAN AWAL TAHUN	:		0,00
PERSEDIAAN AKHIR TAHUN	:		0,00
PERSEDIAAN LAIN LAIN AWAL TAHUN	:		0,00
PERSEDIAAN LAIN LAIN AKHIR TAHUN	:		0,00
Selisih	:		0,00

Beban Penyusutan (LO) harus sama dengan Akumulasi Penyusutan Akhir Tahun dikurangi Akumulasi Penyusutan Akhir Tahun dikurangi Akumulasi Penyusutan Awal Tahun	Beban Penyusutan(LO) = Akumulasi Penyusutan Akhir Tahun - Akumulasi Penyusutan Awal Tahun
RUMUS	
BEBAN PENYUSUTAN (LO)	: 120.507.915,00
AKUMULASI PENYUSUTAN AKHIR TAHUN	: 1.836.595.976,00
AKUMULASI PENYUSUTAN AWAL TAHUN	: 1.709.671.566,00
AKUMULASI AMORTISASI AKHIR TAHUN	: 0,00
AKUMULASI AMORTISASI AWAL TAHUN	: 0,00
Selisih	(6.416.495,00)
1. Akumulasi Penyusutan Mutasi Masuk dari SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR Berdasarkan BAST Nomor : 027/85/Ummu/2020 tanggal 28 Mei 2020 senilai (Rp 6.416.500,00)	
2. Koreksi Penyesuaian Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin Rp 5,00	

**PENJELASAN ATAS PENYAJIAN DATA REALISASI BELANJA MODAL TAHUN ANGGARAN 2020
YANG DICATAT SEBAGAI REALISASI PADA NERACA TAHUN 2020**

SKPD : 5.01.01.04 - SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR (BIRO ORGANISASI)

NO	URAIAN	REALISASI 2020		SELISIH	KETERANGAN	
		BELANJA MODAL	NERACA		Nilai	Penjelasan
1	Tanah	0,00	0,00	0,00		
2	Peralatan dan Mesin	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00		
3	Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00		
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00		
5	Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00		
6	Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00		
	Jumlah	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	

**DAFTAR JAMINAN PEMELIHARAAN
TAHUN ANGGARAN 2020**

SKPD : 5.01.01.04 - SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR (BIRO ORGANISASI)

NO	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NILAI KONTRAK (Rp.)	PELAKSANA	NILAI JAMINAN PEMELIHARAAN (Rp)	MASA JAMINAN PEMELIHARAAN	NAMA PENERBIT JAMINAN PEMELIHARAAN
1	2	3	4	5	6	7	7
Jumlah			0,00		0,00		

**REKAP PEKERJAAN PERENCANAAN TEKNIS
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019**

SKPD : 5.01.01.04 - SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR (BIRO ORGANISASI)

No	Uraian	Lokasi Kota/Kab.	Alamat	Tahun	Saldo Awal	Mutasi		Pengadaan	Saldo Akhir	
						Berkurang	Bertambah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Jumlah						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**BERITA ACARA REKONSILIASI DATA BARANG MILIK DAERAH/ASET
PADA BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALBAR
TAHUN 2020**

Nomor : 028/As./Rekon-Aset/ II/2021

Pada hari ini Senin tanggal Lima Belas Bulan Februari Tahun 2021, yang bertandatangan dibawah ini:

1. Nama : Afriyan Murdiani, SE
NIP : 19700401 200003 1 0008
Jabatan : Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penatausahaan Aset
Unit Kerja : Badan Keuangan dan Aset Daerah Prov. Kalbar.
2. Nama : Andri Renaldi, S. Kom
NIP : 19900704 201502 1 004
Jabatan : Analisis Data dan Informasi
Unit Kerja : Badan Keuangan dan Aset Daerah Prov. Kalbar.
3. Nama : Ricky Terasta, SE
NIP : 19711117 200701 1 015
Jabatan : Pengurus Barang Pembantu
Unit Kerja : Biro Organisasi Sekretariat Daerah Prov. Kalbar
4. Nama : Kili Palyas Natalaga, S.STP, ME
NIP : 19910708 201206 1 003
Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha
Unit Kerja : Biro Organisasi Sekretariat Daerah Prov. Kalbar

menyatakan telah melakukan rekonsiliasi data barang milik daerah/aset tahun 2020 dengan tujuan menjamin kewajaran dan kesesuaian data mutasi masuk/keluar barang milik daerah/aset yang akan disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2020 pada Sekretariat Daerah Prov. Kalbar (Biro Organisasi Sekretariat Daerah Prov. Kalbar) dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Saldo Awal BMD/Aset Tahun 2020 berdasarkan Saldo Akhir 2019 Audited;
2. Mutasi Tambah terdiri dari Hibah Masuk, Penerimaan lain yang sah (donasi, sumbangan), pengakuan kembali aset yang belum tercatat, Mutasi tambah antar SKPD, Reklas (kode, dan lokasi barang) Tambah dan koreksi tambah;
3. Mutasi Kurang terdiri dari Hibah Keluar, Penghapusan BMD, Mutasi kurang antar SKPD, Reklas (kode, dan lokasi barang) Kurang dan koreksi kurang.

13/02/2021
Christi
bagian keuangan

✓
18/2/2021
Christi

4. Rekapitulasi hasil rekonsiliasi, yaitu sebagai berikut:

KIB	SALDO AWAL 2020 = SALDO AKHIR 2019 Setelah Koreksi (Audited)	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir 2020 (Saldo belum termasuk Pengadaan TA 2020)
1	2	3	4	5= (2+3-4)
Jumlah	2.245.515.460,00	224.006.659,00	0,00	2.469.522.119,00
KIB A	0,00	0,00	0,00	0,00
KIB B	1.859.553.278,00	221.698.659,00	0,00	2.081.251.937,00
KIB C	0,00	0,00	0,00	0,00
KIB D	0,00	0,00	0,00	0,00
KIB E	279.037.515,00	0,00	0,00	279.037.515,00
KIB F	0,00	0,00	0,00	0,00
Aset Tak Berwujud	0,00	0,00	0,00	0,00
Aset Lain - Lain	62.630.681,00	0,00	0,00	62.630.681,00
Nilai Buku Aset Lain - Lain	13.764.956,00	0,00	0,00	13.764.956,00
KIB B EXTRA	30.529.030,00	2.308.000,00	0,00	32.837.030,00

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap tiga (3) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pontianak, 15 Februari 2021

Pengurus Barang Pembantu
Biro Organisasi Setda
Prov. Kalbar



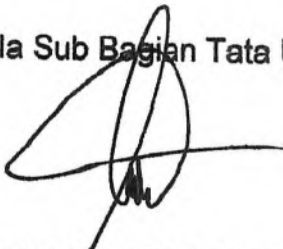
RICKY TERASTA, SE
NIP. 19711117 200701 1 015

Analisis Data dan Informasi,
Badan Keuangan dan Aset Daerah
Prov. Kalbar



ANDRI RENALDI, S.Kom
NIP. 19900704 201502 1 004

Kepala Sub Bagian Tata Usaha



KILI PALYAS NATALAGA, S.STP, ME
NIP. 19910708 201206 1 003

Kepala Sub Bidang Perencanaan dan
Penatausahaan Aset



AFRIYAN MURDIANI, SE
NIP. 19700401 200003 1 008



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Ahmad Yani, Telepon (0561) – 736541 Fax. (0561) – 730062

PONTIANAK

Kode Pos 78124

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG MILIK DAERAH

Nomor : 027/ 85 /UMUM/2020

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Delapan bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **HENDRA, S.Sos.**
NIP : 19680925 198908 1 001
Pangkat : Pembina Utama Muda
Jabatan : Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. Nama : **MARJANI, SE, M.Si.**
NIP : 19660302 198703 1 012
Pangkat : Pembina Tingkat I
Jabatan : Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA telah menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menyatakan telah menerima penyerahan dari PIHAK PERTAMA barang sebagaimana *Rincian Terlampir*.

Bahwa keadaan barang sebagaimana tercantum di dalam *Rincian Terlampir* dimaksud, dalam keadaan **Baik dan Cukup** dan selanjutnya dimanfaatkan untuk kelancaran tugas operasional dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Apabila dipandang perlu dan menyesuaikan peraturan / ketentuan berkenaan dengan tanggungjawab pemanfaatan dan pemeliharaannya sebagai Barang Milik Daerah, maka akan diatur lebih lanjut sebagaimana peruntukan dan keperluannya.

Demikian BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG MILIK DAERAH dibuat dalam rangkap seperlunya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menerima,
PIHAK KEDUA

MARJANI, SE, M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19660302 198703 1 012

Pontianak, tanggal tersebut di atas

Yang Menyerahkan,
PIHAK PERTAMA

HENDRA, S.Sos.

Pembina Utama Muda

NIP. 19680925 198908 1 001

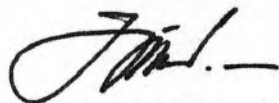
Lampiran BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG MILIK DAERAH

Nomor : 027 / 05 /UMUM/2020

Tanggal : 28 Mei 2020

No	Nama Barang	Jumlah Satuan	Harga Perolehan	Harga Perolehan (per unit)	Ket.
1	Lemari Buku Untuk Perpustakaan	3 Unit	31-12-1974	150.000,00	Baik dan Cukup
2	Lemari Buku Untuk Perpustakaan	5 Unit	19-12-1975	200.000,00	Baik dan Cukup
3	Lemari Buku Untuk Perpustakaan	1 Unit	31-12-1995	158.000,00	Baik dan Cukup
4	Lemari Buku Untuk Perpustakaan	1 Unit	31-12-1997	350.000,00	Baik dan Cukup
5	Lemari Buku Untuk Perpustakaan	1 Unit	31-12-1998	350.000,00	Baik dan Cukup
6	Lemari Buku Untuk Perpustakaan	1 Unit	31-12-2008	6.416.500,00	Baik dan Cukup

Yang Menerima,
PIHAK KEDUA



MARJANI, SE, M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19660302 198703 1 012

Yang Menyerahkan,
PIHAK PERTAMA



HENDRA, S.Sos.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680925 198908 1 001